# Siasah Dusturiyah Kajian Tentang Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Tahun 2008

**Didin Muhafidin**

**ABSTRACT**

"Bantuan Tunai Langsung (BLT)" is a cash funds program has been being for three years by Indonesian government. But the Output has not clear and wide of the mark. In the 2008, the fact show that distribution of BLT give rise to five new problem.

The first, there are many poor people have not take yet BLT at first step in the 2008, because Data of poor people in the 2005 is used for give BLT program in the 2008. The second, distribution of BLT Card not yet apportioning. At the time, there are no people to change the card because many poor people still have no BLT card. The third, less coorditation between central government with branch of PT. Pos Indonesia. Amount poor people in Manado Sulawesi Utara and Kota Baru Kalimantan Selatan have not take yet BLT because PT. Pos Indonesia have not formal instruction yet from central government. The fourth, Amount of BLT funds has not increase and then BLT Program is not valued effectiveness to help poor people in solving their problem. The fifth, BLT program has potency to arise social conflict. Policy of BLT Program as not accepted by Some of them because they think that BLT program is a compesation to increase of BBM. There many poor people have not the right of BLT program, and so they claim to regional government.The problem show that BLT program is accepted to distributed by several of regional government.

The result of this research show that the problem arise because the implementation of policy BLT program less attention for communication between central government with regional government, resouches is used, structure of bureaucracy, and the problem may be heaven in society.

**Key words :** Implementation, Policy, Bantuan Tunai Langsung (Cash Funds).

## A. PENDAHULUAN

Kekisruhan baru sedang terjadi pada implementasi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang mulai dikucurkan oleh pemerintah pusat, Dimensi kekisruhan lahir tidak hanya di level akar rumput (masyarakat), namun telah meluas menjangkau hubungan kelembagaan pemerintahan, khususnya antara pusat - daerah - (termasuk melibatkan) pemerintahan desa. Trend terbaru berupa penolakan atau keberatan terhadap program BLT, secara mengejutkan, muncul dari internal pemerintahan sendiri, tercermin dari penolakan sejumlah pemerintah kabupaten/kota atas program tersebut. Jikapun tidak menolak, sejumlah kabupaten/kota secara berani mengajukan persyaratan tertentu kepada pemerintah pusat sebelum BLT tersebut dibagikan.

Pada level pemerintahan desa, secara berani dan tegas kepala desa yang tergabung dalam Parade Nusantara menyatakan untuk tidak mau terlibat dalam penyaluran BLT. Alasan keengganan sejumlah pemerintah propinsi, kabupaten/kota dan desa tersebut terutama dikarenakan; 1) basis data masyarakat miskin yang dipandang *out of date*, 2) kekhawatiran pemimpin politik di tingkat lokal bahwa BLT justru akan merusak pranata di masyarakat dan 3) potensi konflik di tingkat akar rumput yang berimplikasi pada

membengkaknya biaya sosial yang mesti ditanggung masyarakat. Trend penolakan dari institusi pemerintahan tersebut sontak membuat pemerintah pusat kalang kabut, hal ini tercermin dari sikap Wakil Presiden, Jusuf Kalla, yang secara eksplisit menyatakan akan menindak tegas pejabat daerah yang menghalang-halangi implementasi program BLT. [1]

Reaksi dari pemerintah pusat yang menanggapi aspirasi sejumlah daerah dengan logika hirarkisme kekuasaan tersebut tentu saja sangat disayangkan dan justru menunjukkan bahwa sistem BLT tersebut sejatinya mengandung potensi kekacauan sistemik. Cara pemerintah pusat memandang bahwa penolakan daerah tersebut adalah bentuk pembangkangan daerah atas pemerintah pusat adalah logika yang keliru. Dalam skema tata hubungan pemerintahan, BLT dan bentuk *crash programme* lainnya bisa dikategorikan sebagai kewenangan pemerintah pusat yang diselenggarakan di daerah.

Dari sisi lain, upaya penolakan sejumlah pemerintah daerah termasuk pemerintah desa untuk menyalurkan dana BLT kemasyarakat sebenarnya sudah disertai dengan alasan logis, terlebih jika kita melihat bagaimana kekacauan pelaksanaan (implementasi) program BLT sebelumnya (tahun 2005). Hal yang selalu terdengar dari penerapan program tersebut adalah tidak tepatnya sasaran, penelusuran kesalahan selalu berujung kepada tidak akuratnya data keluarga di Indonesia, sehingga yang terjadi adalah si miskin yang tidak mendapat bantuan, seyogyanya BLT adalah haknya orang miskin padahal orang yang dinilai lalai dalam mendirikan sholat adalah orang yang tidak memperhatikan hak orang miskin (Q.S. Al-Ma'un : 3). [3]

Berdasarkan hasil penelusuran beberapa media massa, implementasi BLT tahun 2008 yang baru dilaksanakan beberapa waktu lalu juga tidak luput dari beberapa permasalahan, setidaknya ada lima permasalahan terkait implementasi program kompensasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) beranggaran Rp. 14,1 triliun yang digelontorkan pemerintah tahun ini. Beberapa diantaranya, menurut Tim Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Tim P2E-LIPI) adalah: [2]

Pertama, banyak warga miskin yang belum menerima BLT pada tahap pertama 2008. karena belum terdata sebagai penerima BLT. Akibat lemahnya metodologi dalam validasi data penerima BLT. Saat ini data yang digunakan adalah data warga miskin tahun 2005. Padahal dalam kurun waktu 3 tahun sesudahnya data tersebut belum tentu valid, karena kemungkinan ada warga yang pindah atau meninggal dunia.

Kedua, distribusi kartu BLT saat ini belum merata. Contoh terjadi di pelaksanaan pencairan kartu BLT masih sepi, karena rumah tangga (RTM) belum menerima kartu BLT yang diperlukan untuk mencairkan dana BLT.

Ketiga, kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan cabang PT Indonesia di daerah. Sejumlah warga miskin di kota Manado, Sulawesi Utara, dan Kota baru Kalimantan Selatan belum menerima penyaluran BLT, karena PT Pos Indonesia di sana menyatakan belum menerima instruksi resmi penyaluran BLT dari pemerintah pusat.

Keempat, pemberian BLT dinilai kurang efektif untuk memecahkan kesulitan warga miskin. Dengan jumlah dana BLT sebesar Rp 100.000,- /bulan tetap saja tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga. Apalagi jumlah dananya juga tidak bertambah dari tahun 2005 hingga sekarang. Padahal disisi lain tingkat inflasi meningkat dan harga barang-barang kebutuhan pokok juga merangkak naik.

---

[1] http://www.radarbanten.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=27010
[2] http://economy.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/05/28/19113318/lima-kelemahan-program-blt.
[3] Qur'an Surat Al - Ma'un : 3

Kelima, program BLT berpotensi menimbulkan konflik sosial di masyarakat. Sebagai contoh, kata dia, ratusan kepala desa di wilayah III Cirebon menolak kebijakan pemberian BLT sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Berdasarkan pengalaman BLT pada 2005, pembagian BLT selalu. Menyisakan gejolak di masyarakat karena pasti ada warga miskin yang tidak masuk daftar akibatnya melakukan protes ke kepala desa. Melihat permasalahan tersebut, maka sangat wajar bila beberapa pemerintah daerah dan desa menolak untuk mendistribusikan BLT kepada masyarakat.

Dari adanya uraian singkat diatas maka penulis tertarik untuk membuat **Kajian Kentang Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahun 2008.**

## B. PEMBAHASAN

### 1. Hubungan Pusat-Daerah Terkait dengan Implementasi Program BLT.

Dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) posisi daerah sebenarnya berada dalam kerangka asas perbantuan. Dari sisi sistem dan hubungan kelembagaan pemerintahan, daerah memang memiliki kewajiban untuk membantu pemerintah nasional dalam pelaksanaan sejumlah programnya. Meskipun posisi daerah adalah sebagai pelaksana, namun tetap saja dibutuhkan proses dialogis antara pemerintah pusat dan daerah sebelum sebuah program diimplementasikan. Dialog antar level pemerintahan ini sangatlah krusial, karena bagaimana juga yang akan berhadapan langsung dengan masyarakat bukanlah pemerintah pusat, namun pemerintah daerah.

Kalau kita melihat secara nyata posisi pemerintah daerah dalam skema BLT adalah tidak selalu menguntungkan, karena dijadikan sebagai bemper pemerintah pusat. Dengan demikian, apapun ekses dari implementasi kebijakan BLT adalah pemerintah daerah dan perangkatnya yang akan menerimanya secara langsung. Lebih jauh lagi, dalam sistem hubungan kelembagaan pemerintahan di Indonesia, ihwal ketentuan tentang tugas perbantuan ini masihlah sangat umum. Adalah tidak ada implikasi dis-insentif apapun (misalnya, penundaan DAU dalam kasus APBD bermasalah), jika daerah tidak mau terlibat dalam tugas perbantuan tersebut.

Karena itu sejatinya pemerintah nasional (pusat) juga tidak memiliki instrumen pemaksa dari aspek sistemik. Artinya, kasus penolakan sejumlah kabupaten/kota dan pemerintah desa atas program BLT merupakan cerminan atas masih rapuhnya bangunan sistem dan hubungan antar level institusi pemerintahan di Indonesia. BLT sebagai implikasi dari kebijakan kenaikan BBM memang sangat rawan untuk dijadikan komoditas politik. Karena itu, pemerintah pusat harus menanggalkan sikap terburu-buru untuk implementasinya dan semestinya melihat secara cermat semua aspek yang terkait dengan rencana BLT tersebut. Respons pemerintah pusat atas penolakan atau keberatan daerah harus dipahami dari sudut Pandang alasan-alasannya, yang kemudian ditindaklanjuti secara tepat dan proporsional.

Perlu ditegaskan kembali, adalah keliru ketika pemerintah pusat menganggap penolakan dan keberatan daerah sebagai bentuk pembangkangan yang harus dikenai sanksi. Pemerintah pusat perlu memahami, bahwa trend perlawanan daerah tersebut merupakan cerminan dari kekacauan sistemik yang menjakiti sistem pemerintahan Indonesia, khususnya dalam konteks hubungan pusat dengan pemerintah daerah/lokal.

### 2. Efektivitas Implementasi Program BLT Tahun 2008

Program BLT (Bantuan Langsung Tunai) bukanlah pertama kalinya diterapkan di Indonesia sebagai bantuan langsung untuk keluarga miskin sebagai kompensasi dari satu kebijakan pemerintah yang telah menaikkan harga Bahan bakar Minyak (BBM). Akan

tetapi, hal yang selalu terdengar dari implementasi BLT adalah tidak tepatnya sasaran penerima program ini, hasil penelusuran beberapa media dan lembaga menunjukkan bahwa kesalahan selalu berujung kepada tidak akuratnya data keluarga miskin di Indonesia.

Kembali dijalankannya program BLT sebagai kebijakan pemerintah yang dalam Instruksi Presiden No.3 Tahun 2008 tentang pelaksanaan pemberian BLT yang melibatkan berberapa instansi yang memiliki kewenangan tersendiri, telah menimbulkan banyak sikap pro dan kontra. tetapi, dibandingkan dengan pelaksanaan BLT sebelumnya, maka pada tahun ini sikap antara terhadap program BLT semakin bertambah, bahkan turut melibatkan ketidaksetujuan dari kalangan internal pemerintah sendiri.

Pada kenyataannya implementasi program BLT tahun 2008 memang tidak jauh berbeda pelaksanaan program pertama di tahun 2005, diantaranya banyak kartu BLT yang justru seharusnya diberikan kepada warga miskin malah sebaliknya berada di tangan orang-orang yang secara ekonomi tergolong mampu. Belum lagi permasalahan-permasalahan lain yang hinggap seperti tidak akuratnya data keluarga miskin di Indonesia, dana yang dibagikan (Rp. 100.000/bulan) tidak menutupi tingkat inflasi yang semakin meningkat dan juga harga-harga kebutuhan terus merangkak naik.

Peneliti Senior P2E LIPI, Wijaya Adi mengungkapkan bahwa berdasarkan data penduduk miskin tahun 2007 mencapai 37,2 juta atau sekitar 16,58 persen, dengan garis kemiskinan Rp 166.697 per orang per bulan. Dengan adanya kenaikan harga BBM, hingga Desember 2008 diperkirakan kebutuhan hidup layak bagi tiap individu adalah sebesar Rp 195 ribu per orang per bulan. Dengan adanya tersebut maka dana BLT yang diberikan sebesar Rp. 100.000 per bulan belumlah mencukupi atau memenuhi kehidupan layak bagi setiap individu, terlebih bagi sebuah keluarga. [4]

Berbeda halnya dengan Asian Development Bank (ADB) yang menilai Bantuan Langsung Tunai (BLT) lebih efektif dibanding program beras miskin (raskin). "Sistem program raskin mengharapkan, si miskin punya uang untuk punya beras, kenyataannya mereka tidak selalu pegang uang untuk beli beras. kata Economist ADB Guntur Sugiyarto. Menurutnya, jika pemerintah mau memperpanjang program raskin maka pemerintah harus memperbaiki sistemnya. Guntur mencontohkan, program raskin India yang tidak membatasi waktu pelaksanaan pembelian beras. "BLT lebih bagus, karena BLT lebih tepat sasaran. Cara bandingkannya, si miskin cuma terima beras 5 kilogram (kg). Padahal seharusnya 20 kg kalau BLT dia pasti terima Rp100 ribu, terserah mau diapain. Jadi efektifitasnya tepat sasaran, bukan dampaknya," papar Guntur.

Memang bukan perkara mudah untuk mengatakan dan mengambil Kesimpulan apakah program BLT tahun ini dapat dikatakan berjalan efektif atau tidak, tetapi tentunya ada suatu tolak ukur yang dapat diperhatikan dari implementasi program BLT tahun ini, yaitu dengan membandingkannya terhadap implementasi program BLT sebelumnya (tahun 2005). Berdasarkan uraian para pakar dan hasil pemberitaan media, yang mengungkapkan bahwa banyak permasalahan pembagian dana BLT kembali terulang seperti periode sebelumnya, maka dapat kita katakan sejauh ini efektifitas implementasi program BLT tahun ini belum tercapai.

Cara lain untuk mengukur apakah implementasi program BLT ini dapat dikatakan efektif atau tidak adalah dengan melihat kepada indikator sebuah program secara teoritis indikator program dapat mengukur secara lebih objektif apakah

[4] http://economy.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/06/10/20/19113318/adb-blt-lebih-efektif-dari-raskin.

pelaksanaan suatu program efektif atau tidak efektif. Beberapa indikator program yang dapat digunakan diantaranya adalah: [5]

1. Terukur: waktu, kualitas, dan kuantitas.
2. Terdesiminasi: dipahami oleh semua pihak.
3. Ada keunggulan tertentu.
4. Kearah yang lebih baik (pembangunan).

Disamping keempat aspek di atas, adapula komponen program yang tentunya harus dipenuhi apabila suatu progran ingin dikatakan berhasil, dimana dalam komponen program disebutkan adanya sub sistem dari suatu program artinya semua pihak yang tekait dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi program. Melihat kepada empat indikator di atas dan juga merujuk kepada komponen program yang harus dipenuhi, maka fakta dilapangan menunjukkan bahwa semua indikator dan komponen program bagi program BLT belum terpenuhi, yang artinya implementasi program BLT secara objektif dan keilmiahan juga tidak bisa dikatakan berhasil dan efektif.

Sebagai contoh belum terpenuhinya beberapa indikator dan komponen program adalah:

1. Terkait masalah keterukuran, yaitu waktu persiapan pelaksanaan program BLT yang begitu cepat dan tanpa persiapan yang matang, yang dfbuktikan dari masih digunakannya data sensus 2005 untuk membagikan dana BLT dan juga ketidaksiapan aparat dilapangan; masalah kualitas, maka dapat dikatakan kualitas program BLT 2008 tidak jauh berbeda dengan tahun '005, banyak permasalahan rakyat miskin tidak mendapat jatah kartu sedangkan yang kaya mendapatkannya;
2. Banyak pihak, baik masyarakat maupun aparat pemerintah di daerah tidak memahami teknis pelaksanaan program BLT. Banyak masyarakat yang masih belum paham kemana mereka akan mengambil dana BLT dan apa syaratnya. Sedangkan bagi aparat pemerintah di daerah kebingungan terjadi karena daerah diminta untuk menalangi dana BLT padahal kas daerah teralokasikan untuk kebutuhan lain, dan teknis pelaksanaan pembagian dana BLT dilapangan tidak jelas, hal ini yang menjadi salah satu faktor dari sekian banyak faktor lainnya yang membuat beberapa pemerintah daerah dan desa enggan melaksanakan program BLT.
3. Tidak terpenuhinya keunggulan tertentu, walaupun ADB menyatakan program BLT lebih baik dari program beras miskin (raskin).
4. Implementasi program BLT belum membawa kepada perubahan yang lebih baik (pembangunan), dengan asumsi kebutuhan hidup layak bagi tiap individu sebesar Rp 195 ribu per orang per bulan, maka dana BLT yang diberikan Rp. 100.000 per bulan (sama dengan tahun 2005) belum mampu memenuhi kebutuhan hidup layak. Disamping itu secara psikologis pemberian dana BLT tidak baik bagi perilaku masyarakat, sebab tidak memberikan masyarakat kailnya melainkan ikannya, akibatnya muncul mental pengemis atau pura-pura miskin.
5. Belum terpenuhinya komponen program BLT yang mengharuskan adanya keterlibatan semua komponen yang tekait dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi program. Sebagai contoh banyak pemerintah daerah dan desa yang menolak membantu pemerintah pusat dalam membagikan dana BLT, ditambah pula beberapa DPRD menolak untuk menalangi dan menutupi kekurangan dana BLT dari APBD.

[5] Muhafidin, Didin. Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Program.

Disamping itu implementasi program BLT belum dapat memecahkan masalah kemiskinan atau setidaknya membantu mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat, sebagai akibat naiknya beberapa kebutuhan harga terutama harga BBM. Banyak pihak berpendapat, sebenarnya kalou tujuan pemerintah membantu rakyat miskin maka pemerintah seharusnya lebih kreatif dalam mengambil kebijakan untuk dijadikan sebuah program, bukan dengan kebijakan populis dan keropos seperti BLT.

**3. Dampak Implementasi BLT terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat**

Indonesia adalah negara besar dalam banyak hal. Selain memiliki luas wilayah penduduk, dan utang yang besar, Indonesia memiliki penduduk miskin yang besar pula. Jumlah penduduk miskin di Indonesia saat ini yang 140 juta orang jauh melampaui keseluruhan jumlah penduduk di Selandia Baru (sekitar 4 juta orang), serta Australia dan Malaysia dengan penduduk masing-masing berjumlah sekitar 10 juta dan 24 juta jiwa. [6]

Lebih miris lagi jika kita menyaksikan kasus busung lapar yang sering menerpa Indonesia sejak lama. Fenomena busung lapar yang saat ini masih menggegerkan Indonesia, terutama kasus yang terjadi di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT), adalah puncak gunung es dari gunung masalah kemiskinan yang paling ekstrem. Potret kemiskinan itu sesungguhnya akan bertambah buram lagi, jika pengukuran kemiskinan menggunakan garis kemiskinan (*poverty line*) yang lain.

Alat ukur yang dapat dipergunakan saat ini berdasarkan pada konsep kemiskinan absolut yang lebih menekankan pada pemenuhan kebutuhan makanan, yakni sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membeli makanan setara 2.100 perorang perhari. Kebutuhan non-makanan, seperti pakaian, perumahan, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa masih belum diperhatikan secara memadai dalam indikator yang sering digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Walhasil, jika garis kemiskinan dari Bank Dunia sebesar $2 perhari perorang yang digunakan, maka jumlah orang $m^2$iskinfakan lebih membengkak lagi.

Terkait dengan adanya kenaikan harga BBM, maka dalam banyak kehidupan ekonomi hal ini berdampak pula pada naiknya harga-harga kebutuhan pokok masyarakat, baik makanan, kesehatan, pendidikan, dan khususnya transportasi. Jika hal ini dijadikan sebagai pegangan, maka kenaikan harga BBM. Secara langsung atau tidak langsung telah menjadi salah satu faktor tambahan semakin memberatkan dan membuat rakyat Indonesia berada dalam kategori miskin.

Dalam bukunya membangun masyarakat dan memberdayakan rakyat, Suharto mengungkapkan tentang salah satu strategi penanggulangan kemiskinan yang sangat erat kaitannya dengan perspektif pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial adalah perlindungan sosial (*social protection*). Perlindungan sosial adalah skema yang dirancang secara terencana oleh pemerintah maupun masyarakat untuk melindungi anggotanya dari berbagai resiko dalam kehidupannya. Secara konseptual, perlinduangan sosialmencakup: bantuan sosial, asuransi sosial, kebijakan-kebijakan pasar kerja, serta mekanisme dan jaring pengaman sosial berbasis masyarakat.

Merujuk kepada apa yang dikemukakan oleh Suharto dan lalu dikaitkan dengan implememtasi program BLT, maka penulis berpendapat bahwa program BLT merupakan

---

[6] Suharto, Edi. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung : PT. Refika Aditama. hlm. 10

salah satu cara dan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial atas naiknya harga BBM. Akan tetapi, yang perlu menjadi perhatian adalah agar program perlindungan sosial ini, khususnya BLT, menjadi lebih tepat sasaran, terdistribusikan secara merata, serta mampu mengimbangi tingkat inflasi yang tinggi. [7]

Sementara, belajar dari pelaksanaan program BLT 2005 dan BLT 2008, maka seharusnya pemerintah pusat mau menerima masukan dari berbagai pihak terkait dengan perbaikan implementasi program BLT. Apabila program BLT telah diimplementasikan dengan sungguh-sungguh dan direncanakan sesuai dengan rencana yang matang dan meminimalisir kesalahan yang pernah terjadi sebelumnya, maka implementasi program BLT sebagai konsepsi tentang perlindungan sosial akan sejalan dengan perspektif pembangunaa serta pemberdayaan masyarakat.

## C. KESIMPULAN

Terkait dengan memburuknya hubungan-pusat dan daerah terkait dengan implementasi program BLT, maka yang perlu diperhatikan adalah bahwa dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) posisi daerah sebenarnya berada dalam kerangka asas perbantuan. Dari sisi sistem dan hubungan kelembagaan pemerintahan, daerah memang memiliki kewajiban untuk membantu pemerintah pusat dalam pelaksanaan sejumlah programnya, tetapi meskipun posisi daerah adalah sebagai pelaksana, tetap saja dibutuhkan proses dialogis antara pemerintah pusat dan daerah sebelum sebuah program diimplementasikan.

Dialog antar level pemerintahan ini sangatlah krusial, karena bagaimana juga yang akan berhadapan langsung dengan masyarakat bukanlah pemerintah pusat, namun pemerintah daerah. Maka dari itu adalah keliru ketika pemerintah pusat menganggap penolakan dan keberatan daerah sebagai bentuk pembangkangan yang harus dikenai sanksi. Pemerintah pusat perlu memahami, bahwa trend perlawanan daerah tersebut merupakan cerminan dari kekaeauan sistemik yang menjangkiti sistem pemerintahan Indonesia, khususnya dalam konteks hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah/lokal.

Dalam hal efektifitas implementasi program BLT di tahun 2008 ini, maka dapat dikatakan sejauh ini efektifitas implementasi program BLT tahun ini masih belum tercapai. Banyak permasalahan pembagian dana BLT kembali terulang seperti periode sebelumnya (tahun 2005), belum lagi jika kita memperhatikan indaktor program dan komponen program yang harus dipenuhi sebagai salah satu syarat apakah suatu program dapat dinilai sukses dan efektif. Banyak indikator program yang masih belum terpenuhi dalam implementasi program BLT, disamping masih rapuhnya komponen program yang disyaratkan.

Sedangkan untuk hal dampak implementasi program BLT terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dapat disimpulkan bahwa program BLT merupakan salah satu cara dan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial atas naiknya harga BBM. Akan tetapi, yang perlu menjadi parhatian adalah agar program perlindungan sosial ini, khususnya BLT, menjadi tepat sasaran, terdistribusikan secara merata, serta mampu mengimbangi tingkat inflasi yang tinggi.

---

[7] Suharto, Edi. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung : PT. Refika Aditama. hlm. 25

## DAFTAR PUSTAKA


Bass, Bernard M; Stogdill's Handbook of Leadership : *A Survey, Theory and Research* revised and expanded edition, The Free Press, New york, 1981

Bitel, Lester Robert (ed); *Encyclopedia of Professional Management*, Volume 1 & 2, McGraw-Hill. Inc, 1980

Corson, John J and Joseph P. Harris; *Public Administration on Modern Society*, McGraw-Hill Book Company, INC, New York, 1963.

Dimock, M. E; *Public Administration*, Rinehart & Co, New York, 1960.

Etzioni, Amitai; *Organisasi-organisasi Modern*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1985.

Gibson, Janes L, John M. Ivanevich, James H. Donnelly, Jr; *Organisasi dan Manajemen*: Perilaku, Struktur, Proses, (terjemahan) edisi keempat, Erlangga, Jakarta, 1984.

Goble, Frank G; Mashab Ketiga: *Psikologi Humanistik Abraham Maslaw*, Kanisius, Jogjakarta, 1987.

Hall, Richard H; Organizations: *Structure and Process third edition*, Prentice Hall, Inc, 1982.

Hersey, Paul and Kenneth H. Blanchard; *Management of Organisationnal Behavior*: Utilizing Human Resources, fourth edition, Prentice Hall of India, New Delhi, 1985.

Hellriegel, Don and John W. Slocum Jr; Management: *Contingency Approach*, second edition, Addition-Wesley Publishing Company, Inc, Philippines, 1978.


**Elektronik**


http://economy.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/05/28/19113318/lima-kelemahan-program-blt.

http://economy.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/06/10/20/19113318/adb-blt-lebih-efektif-dari-raskin.

http://www.radarbanten.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=27010.

Lepawsky, Albert; Administration; *The Art and Science of Organization and management*, alfred A. Knoff, New York, 1960.


**Makalah / Handout**


Muhafidin, Didin. Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi Program.

Suharto, Edi. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung : PT. Refika Aditama.

Tachjan, 2008. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung : AIPI Bandung dan Puslit KP2W Lemlit UNPAD.